

Judul : Puteri kasih cacatan kritis
Tanggal : Senin, 24 Januari 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 12

Soroti Kinerja APBN 2021

Puteri Kasih Catatan Kritis



Puteri Anetta Komarudin

ANGGOTA Komisi XI DPR, Puteri Anetta Komarudin memberikan sejumlah catatan kritis kepada Kementerian Keuangan terkait evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2021 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021, serta rencana PEN 2022.

"Saya ingin memberikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan atas capaian penerimaan pajak maupun bea dan cukai yang telah melebihi target," urai Puteri, kemarin.

Capaian ini, lanjut Puteri, tentu menjadi modal semangat bagi Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk mengejar target penerimaan perpajakan pada APBN 2022. Apalagi berbagai upaya reformasi fiskal tahun ini juga didukung secara regulasi seiring disahkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak dalam APBN tahun 2021 mencapai Rp 1.277,5 triliun atau setara 103,9 persen dari target. Sedangkan, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat mencapai Rp 269 triliun atau sekitar 125,1 persen dari

target. Puteri pun berharap target penerimaan perpajakan tahun 2022 bisa tercapai secara maksimal.

"Karenanya, Kemenkeu juga harus memastikan kesiapan secara memadai baik dari segi peraturan pelaksana, SDM, teknologi, hingga strategi implementasi sehingga Undang-Undang HPP ini dapat bekerja optimal dalam mengejar target penerimaan negara dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang," tegas Puteri.

Lebih lanjut, Puteri juga menyoroti terkait realisasi belanja pemerintah dalam APBN tahun 2021, khususnya belanja subsidi pupuk. Hal ini lantaran subsidi pupuk menjadi salah satu persoalan yang dihadapi di daerah pemilihannya.

"Pemerintah perlu memastikan dan menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi secara merata. Apalagi sekarang ini kita sudah memasuki musim tanam, termasuk di daerah pemilihan saya yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta yang merupakan lumbung padi nasional. Namun, para petani selalu mengeluhkan ketersediaan pupuk yang terjangkau. Karenanya, belanja subsidi ini harus dipastikan menjangkau para petani, termasuk di dapil saya," ucapnya.

Menutup keterangannya, Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya alokasi anggaran untuk perlindungan perempuan dan anak serta pemberdayaan kepemudaan.

"Kita ingin mengetahui realisasi tracking anggaran berbasis gender dalam APBN untuk mengukur sejauh mana dukungan pemerintah dalam mewujudkan perlindungan atas perempuan dan anak," tutup Puteri. ■ KAL